

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KEBIJAKAN DESA, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)**

SKRIPSI



**Oleh:
Berlian Nuring Maharani
20219320**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KEBIJAKAN DESA, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)**

SKRIPSI



**Oleh:
Berlian Nuring Maharani
20219320**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Berlian Nuring Maharani
NIM : 20219320
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Kebijakan Desa, Dan
Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Studi Kasus Desa Jati Kecamatan Gatak
Kabupaten Sukoharjo)

Disetujui dan disahkan oleh :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Januari 2022

Dosen Pembimbing,



Eko Triyanto, S.E., M.M

NIDN. 0217048601

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Saharsini, S.E., M.Acc

NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Berlian Nuring Maharani
NIM : 20219320
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk mensenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 17 Februari 2022

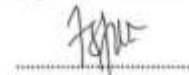
Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Eko Triyanto, S.E., M.M



Anggota : Astuning Saharsini, S.E., M.Acc



Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H

NIDN. 0620026601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KEBIJAKAN DESA, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Surakarta, 19 Januari 2022
Yang Memberi Pernyataan



Berlian Nuring Maharani

MOTTO

“Permata tidak bisa berkilau tanpa gesekan. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa cobaan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

1. Almamater saya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Orang tua saya, Ayahanda Suwanto dan Ibunda Watini yang selama ini telah mendukung saya dan tidak henti-hentinya mendoakan saya agar sukses.
3. Teman-teman tercinta yang sudah membantu dalam kelancaran skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata I (S1) Jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik dan lancar tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Astuning Saharsini, S.E., M.Acc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Eko Triyanto, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing penyusunan Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan dukungan dengan sabar selama penulis menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
5. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan selalu memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Sahabat terdekat penulis di perkuliahan Nadilawan Safitri dan Yessy Mustavi Ana yang selalu memberi bantuan, semangat dan selalu berangkat bimbingan bersama dari awal penyusunan skripsi sampai akhir penyusunan skripsi.
7. Seluruh Masyarakat Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang sudah bersedia menjadi responden.
8. Teman-teman saya yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk cepat menyelesaikan skripsi.

9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ke depan.

Surakarta, 19 Januari 2022



Berlian Nuring Maharani

NIM. 20219320

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-7
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8-22
A. Teori Yang Relevan	8
B. Penelitian Terdahulu	17
C. Kerangka Pikir.....	20
D. Hipotesis.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23-32
A. Objek Penelitian	23
B. Jenis Dan Sumber Data	23
C. Populasi Dan Sampel	24
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Definisi Operasional.....	27

F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	33-47
A. Identitas Responden	33
B. Analisis Data	35
C. Pembahasan	44
BAB V PENUTUPAN	48-49
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1. Populasi Penelitian Desa Jati	24
Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel	27
Tabel 4.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 4.2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Usia.....	33
Tabel 4.3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	34
Tabel 4.4. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	35
Tabel 4.5. Uji Validitas	36
Tabel 4.6. Uji Reliabilitas	37
Tabel 4.7. Uji Normalitas	38
Tabel 4.8. Uji Multikolinearitas	38
Tabel 4.9. Uji Heteroskedastisitas.....	39
Tabel 4.10. Uji Autokorelasi.....	39
Tabel 4.11. Uji Analisis Regresi Linier Berganda	40
Tabel 4.12. Uji t	41
Tabel 4.12. Uji F	43
Tabel 4.13. Uji R^2	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	20
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Kuesioner

- A. Akuntabilitas
- B. Kebijakan Desa
- C. Partipasi Masyarakat
- D. Kesejahteraan Masyarakat

Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Kuesioner Akuntabilitas

Lampiran 3 Tabulasi Jawaban Kuesioner Kebijakan Desa

Lampiran 4 Tabulasi Jawaban Kuesioner Partisipasi Masyarakat

Lampiran 6 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X1)

Lampiran 7 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X2)

Lampiran 8 Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat (X3)

Lampiran 9 Hasil Uji Validitas Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Lampiran 10 Hasil Uji Reliabilitas

Lampiran 11 Hasil Uji Normalitas

Lampiran 12 Hasil Uji Multikolinearitas

Lampiran 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 14 Hasil Uji Autokorelasi

Lampiran 15 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Lampiran 16 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Lampiran 17 Hasil Uji Statistik (Uji F)

Lampiran 18 Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi

Lampiran 19 Buku Konsultasi Skripsi

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KEBIJAKAN DESA DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi Kasus Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)

Oleh Berlian Nuring Maharani, NIM 20219320

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara akuntabilitas, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat studi kasus Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode tersebut diperoleh sampel sebanyak 97 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo..

Kata Kunci: akuntabilitas, kebijakan desa, partisipasi masyarakat, kesejahteraan masyarakat.

**THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY, VILLAGE POLICY AND
COMMUNITY PARTICIPAN ON COMMUNITY WELARE**

(Case Study of Jati Village, Gatak District, Sukoharjo Regency)

By Berlian Nuring Maharani, NIM 20219320

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of accountability, village policy and community participation on community welfare. Case study of Jati Village, Gatak District, Sukoharjo Regency In this study using quantitative methods. Collecting data in this study using a questionnaire. The population in this study was the people of Jati Village, Gatak District, Sukoharjo Regency, the sample in this study was obtained using purposive sampling method. Based on this method, a sample of 97 respondents was obtained. The data analysis method used is the research instrument test, classical assumption test, multiple regression analysis, and hypotesis testing Based on the results of the analysis that has been carried out this study shows that accountability, village policies and community participation have a positive effect on the welfare of the people of Jati Village, Gatak District, Sukoharjo Regency.

Keywords: *accountability, village policy, community participation, community welfare.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan sebuah proses yang mulai dari identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasikan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian pada keuangan, penyajian laporan, dan penginterpretasian atas hasil. Akuntansi diartikan juga sebagai tahapan yang dimulai dari mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan sebuah informasi ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan pencapaian pada keputusan yang tepat terhadap pihak pemakai informasi (Nordian, 2012: 1). Menurut Setyowati (2015: 1) akuntansi diartikan sebagai proses pelacakan, pencatatan dengan menggunakan analisa terhadap biaya yang berkaitan dengan segala aktivitas organisasi dalam menghasilkan barang maupun jasa yang berkaitan dengan asset. Akuntansi didefinisikan sebagai seni terhadap proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan pada transaksi dengan berdasarkan pada standar yang diakui umum (Bahri, 2016: 2).

Akuntansi pemerintah adalah sebuah ilmu akuntansi yang berupa pencatatan dan pelaporan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu badan Pemerintahan. Akuntansi Pemerintah tidak hanya dilakukan pada ruang lingkup pemerintahan saja, melainkan juga dilakukan pada ruang lingkup pemerintah tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa merupakan satu kesatuan wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati di dalam sistem pemerintahan NKRI. Sebagai organisasi administrasi pemerintahan terkecil, dalam desa diperlukan sebuah penataan dan pengelolaan yang baik. Fungsi dari penataan dan pengelolaan ini didasarkan pada evaluasi perkembangan pemerintahan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan suatu desa.

Desa sebagai organisasi administrasi pemerintahan terkecil juga memiliki sebuah dampak terhadap suatu kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh sebuah daerah dan tidak terkecuali harapan bagi desa-desa. Kesejahteraan masyarakat adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012: 123). Kesejahteraan masyarakat juga sangat diharapkan oleh masyarakat di wilayah Desa Jati, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Alokasi dana di Desa Jati diketahui sejumlah Rp. 662.806.000 (www.jdih.sukoharjo.go.id). Berkaitan dengan hal itu, terdapat beberapa pengaruh yang mendorong kesejahteraan masyarakat, antara lain akuntabilitas, kebijakan dana, dan partisipasi masyarakat.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban terhadap penyampaian pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat di sebuah desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan sebuah tanggung jawab atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum atau pimpinan dalam organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan (Halim, 2014: 83). Akuntabilitas memiliki sebuah asas, asas akuntabilitas adalah sebuah asas yang digunakan dalam menentukan segala bentuk kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil keputusan akhir dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang berperan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Tiwinarni, 2017: 18).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sari dan Mildawati (2019) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian dari Kurniawati, Pangatouw (2017) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh negative terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tidak terlepas dari pengaruh adanya implementasi dari kebijakan desa. Implementasi kebijakan desa harus dilakukan dengan benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa dengan masyarakat desa (Elvina dan Musdhalifah, 2019: 72). Implementasi kebijakan desa harus sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dinyatakan bahwa masih belum efektifnya program dalam pembangunan dalam sebuah desa yang

disebabkan karena masih adanya desa yang mengalokasikan penggunaan dana desa yang tidak sejalan dengan prioritas yang diamanatkan oleh pihak aparat desa, pembangunan desa yang tertinggal dan masih belum adanya peraturan dari pemangku desa (Fahri, 2017: 112). Implementasi kebijakan desa dirasakan kurang efektif ketika alokasi dana desa tidak digunakan sesuai dengan prioritas (Kuswanti, 2020: 222).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kuswanti dan Kurnia (2020) menunjukkan bahwa variabel kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian dari Novitasari (2019) menunjukkan bahwa variabel kebijakan desa berpengaruh negative terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan dari masyarakat juga didukung oleh partisipasi dari masyarakat di wilayah sebuah desa. Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan tentang pengelolaan keuangan desa. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat melalui badan perwakilan ataupun masyarakat secara langsung. Kuswanti (2020: 223) menyatakan bahwa keberhasilan dari pembangunan desa tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, hal tersebut digunakan untuk memastikan tahapan pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Pratama (2017: 78) apabila masyarakat memiliki partisipasi aktif, maka akan bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan di dalam ruang lingkup wilayah desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Indrayani dan Setiawina (2018) menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian dari Dewi

(2020) menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil observasi pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan sebuah informasi bahwa akuntabilitas masih kurang tersampaikan kepada masyarakat dikarenakan masyarakat kurang begitu memahami peranan akuntabilitas yang menjadikan masyarakat enggan menanyakan kinerja pada struktur organisasi di wilayah desa. Masyarakat menilai kinerja struktur organisasi desa hanya dominan melalui apa yang dilihat saja tanpa adanya sebuah keterangan yang jelas. Di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo sudah memberikan beberapa kebijakan desa yang jelas, namun masih saja beberapa masyarakat diketahui masih menyepelekan kebijakan dan bahkan ada yang melanggar. Hal ini berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat akan peran penting dalam menerapkan sebuah kebijakan yang baik. Dampak lain dari hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang dalam memberikan partisipasi yang baik untuk sebuah desa.

Dari uraian penelitian terdahulu diatas terdapat hasil yang berbeda. Hasil yang berbeda tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti tempat, waktu, pemahaman responden dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil yang bertentangan antara peneliti yang satu dengan yang lainnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Kebijakan Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh signifikansi akuntabilitas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Mengetahui pengaruh signifikansi kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
3. Mengetahui pengaruh signifikansi partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

Dengan adanya penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi pemicu pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa saja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja suatu organisasi atau pimpinan kepada pihak yang membutuhkannya dengan bentuk laporan yang dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan dengan menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pelaporan (Renyowijoyo, 2013). Kewajiban untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan tentang kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum atau pimpinan dalam sebuah organisasi kepada pihak yang berhak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban (Halim, 2014: 83). Akuntabilitas juga diartikan sebagai suatu istilah yang memiliki beberapa makna yang berkaitan dengan beberapa konsep dengan harapan memberi mandat kepada pemberi mandat (Wibisono, 2018: 6). Menurut Mardianto (2016: 46) akuntabilitas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban seseorang dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai ketetapan tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas dari pakar ahli, maka akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai istilah terhadap sebuah tata kelola Pemerintah yang digambarkan sebagai hubungan antar individu, kelompok, sebagai sebuah pertanggungjawaban dan kewajiban yang dapat diberikan hukuman apabila dilakukan penyelewengan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Aspek dalam Akuntabilitas

Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek yaitu:

- 1) Akuntabilitas sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*).
- 2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability result oriented*).
- 3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability requires reporting*).
- 4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*).

5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability improves performance*).

c. Macam-macam Akuntabilitas

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain:
(Ulum, 2015: 42)

1) Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas internal merupakan akuntabilitas yang berlaku pada setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan Pemerintah Negara dan termasuk Pemerintahan yang dimana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu atau kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggungjawabkan pada atasan secara langsung berkaitan dengan kinerja yang dibutuhkan.

2) Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas eksternal merupakan akuntabilitas yang menempel pada Lembaga Negara sebagai organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang diterima dan dilakukan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungan organisasi.

d. Prinsip dalam Akuntabilitas

Prinsip dalam akuntabilitas terdapat beberapa, antara lain:
(Christianingrum, 2018:101)

1) Transparasi, berkaitan mengenai kemampuan sebuah organisasi dalam mengungkapkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kinerja.

2) Kewajiban, berkaitan dengan cara organisasi dalam menangani konsekuensi dari kinerja.

- 3) Dapat dikendalikan, berkaitan dengan penyesuaian tugas yang diberikan.
- 4) Tanggungjawab, berkaitan dengan rasa tanggungjawab atas standar kinerja yang diterapkan.
- 5) Tanggapan, berkaitan dengan pemenuhan harapan yang nyata terhadap pemangku kepentingan yang harus dipenuhi organisasi.

e. Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas harus dilakukan oleh organisasi (Mahmudi, 2013: 9), antara lain:

1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Merupakan akuntabilitas untuk berperilaku jujur dalam melakukan sebuah pekerjaan dengan menaati ketentuan hukum yang berlaku.

2) Akuntabilitas Manajerial

Merupakan pertanggungjawaban lembaga public untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3) Akuntabilitas Program

Merupakan hal yang mencakup pertimbangan tujuan yang akan ditetapkan.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Merupakan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan dalam sebuah organisasi.

5) Akuntabilitas Finansial

Merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif.

2. Kebijakan Desa

a. Pengertian Kebijakan Desa

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000:17) Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Sari, Mildawati (2019) kebijakan desa merupakan suatu pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut dalam melaksanakan suatu program untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kebijakan desa adalah produk hukum yang mana setiap pemerintah secara hukum mempunyai wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri.

Kuswanti, Kurnia (2020) kebijakan desa merupakan produk hukum karena setiap pemerintah secara hukum memiliki hak atau wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah desa itu sendiri.

Secara Undang-Undang, kebijakan formal di level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa. Sedangkan secara struktur Undang-Undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjelaskan otonomi secara independen, melainkan tanggungjawab otonomi desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan

nasional secara umum dan pembangunan desa sendiri secara khusus (Hadi, 2019).

b. Dimensi Kebijakan Desa

Menurut Purwanto (2015: 106) ada beberapa dimensi kebijakan desa yang bisa digunakan untuk melihat kinerja implementasi kebijakan, antara lain:

1) Akses

Akses merupakan terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, baik karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada diri sendiri.

2) Bias

Bias merupakan penilaian terhadap suatu layanan yang diberikan oleh implementer bias kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran untuk menikmati bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

3) Ketepatan Layanan

Ketepatan layanan merupakan penilaian terhadap layanan yang diberikan dalam implementasi suatu program yang dilakukan secara tepat waktu atau tidak.

4) Akuntabilitas

Akuntabilitas digunakan untuk menilai tindakan para implementer dalam menjalankan tugas untuk menyampaikan kebijakan kepada kelompok sasaran untuk dapat dipertanggungjawabkan.

5) Kesesuaian Program dan Kebutuhan

Kesesuaian program dan kebutuhan digunakan untuk mengukur kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran dengan kebutuhan.

3. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Syamsi (2014) partisipasi masyarakat merupakan proses ketika masyarakat mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam buku Pemberdayaan Masyarakat (2010) karya Sawa Suryana, partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara dalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum.

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelestarian lingkungan di dalam lingkup masyarakat (Dewi, dkk 2013). Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu program yang mana masyarakat ikut merasakan manfaat dari kebijakan tersebut, dan

masyarakat juga diikutsertakan dalam evaluasi untuk dapat meningkatkan kebaikan bersama (Mulyadi, 2019).

Secara umum disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan semua anggota masyarakat dalam sebuah desa dalam perihal pembuatan dan pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan terhadap masyarakat di wilayah terkait.

b. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain: (Dwiningrum, 2015: 58)

1) Partisipasi secara fisik

Merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha.

2) Partisipasi secara non fisik

Merupakan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha.

c. Unsur Partisipasi Masyarakat

Ada tiga unsur pokok yang menentukan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, yaitu :

1) Adanya kesempatan yang diberikan masyarakat untuk berpartisipasi.

2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.

3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

4. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2010). Kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, dan spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga dan masyarakat wilayah setempat.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

- 1) Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
- 2) Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.
- 3) Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

b. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Fahrudin (2012:10) kesejahteraan masyarakat mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok.
- 2) Untuk mencapai peyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

c. Dimensi Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa dimensi kesejahteraan masyarakat, antara lain:
(Suharto, 2017)

- 1) Adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif
- 2) Adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif
- 3) Adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	Mandy Tania Sari dan Titik Mildawati (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparasi, Dan Kebijakan Desa Terhadap	X1 = Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa X2 = Transparasi X3 =Kebijakan Desa	Y = Kesejahteraan Masyarakat	Analisis Regresi Linier Berganda	- Variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. - Variabel transparasi terdapat pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. - Variabel kebijakan desa

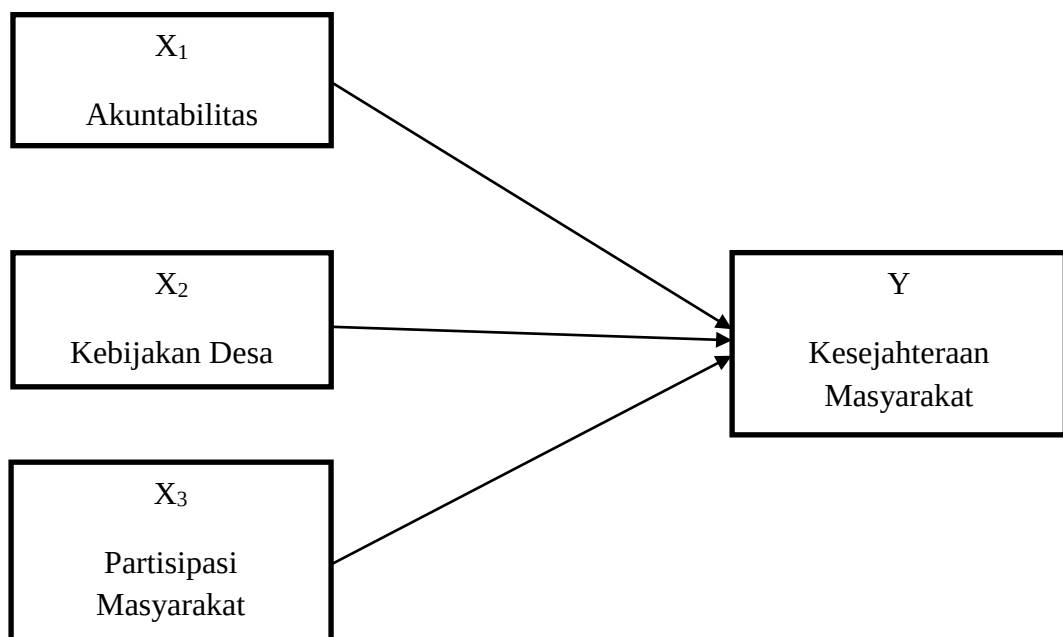
No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
		Kesejahteraan Masyarakat				mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
2	Afida Putri Eka Kuswanti dan Kurnia (2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	X1 = Akuntabilitas X2 = Transparansi ADD X3 = Kebijakan Desa X4 = Partisipasi Masyarakat	Y = Kesejahteraan Masyarakat	Analisis Regresi Linier Berganda	- Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. - Transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. - Kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. - Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
3	Yuli Kurniawati dan Bill J.C. Pangayouw S.E.,M.Si., Ak (2017)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung Dan Kelembagaan Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura)	X1 = Alokasi Dana Kampung X2 = Kebijakan Kampung X3 = Kelembagaan Kampung	Y = Kesejahteraan Masyarakat	Smart PLS (<i>Partial Least Square</i>)	Alokasi dana kampung, kebijakan kampung dan kelembagaan kampung tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
4	Dewi Kusuma	Pengaruh Transparansi	X1 = Transparansi	Y = Kesejahteraan	Analisis Regresi	- Pemberdayaan masyarakat berpengaruh

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
	Wardani dan Ratih Ranika Putri Utami (2020)	Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo	Pengelolaan Keuangan Dana Desa X2 = Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Berganda	positif terhadap kesejahteraan masyarakat, - Transparansi pengelolaan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
5	Loura Emylia dan Titik Mildawati (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	X1 = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa X2 = Kebijakan Desa X3 = Kelembagaan Desa	Y = Kesejahteraan Masyarakat	Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel akuntabilitas keuangan alokasi dana desa, variabel kebijakan desa dan variabel kelembagaan desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
6	Rifa Rizka Hadi (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)	X1 = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa X2 = Kebijakan Desa X3 = Partisipasi Masyarakat	Y = Kesejahteraan Masyarakat	Analisis Regresi Berganda	- Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat - Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
7	Novitasari dan Nur Fadrih Asyik (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana	X1 = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana	Y = Kesejahteraan Masyarakat	Analisis Regresi Berganda	- Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
		Desa, Transparasi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Desa X2 = Transparasi X3 = Kebijakan Desa			- Transparasi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. - Kebijakan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu, maka dapat digambarkan model kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah akuntabilitas (X_1), kebijakan desa (X_2), dan partisipasi masyarakat (X_3).
2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat (Y).

D. Hipotesis

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja suatu organisasi atau pimpinan kepada pihak yang membutuhkannya dengan bentuk laporan yang dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan dengan menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pelaporan (Renyowijoyo, 2013). Menurut Kuswanti dan Kurnia (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

2. Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 2000:17). Menurut Sari dan Mildawati (2019) dalam penelitiannya menunjukkan

bahwa variabel kebijakan desa mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Kebijakan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan pengawasan kinerja pemerintah serta mengurangi penyalahgunaan wewenang. Menurut Syamsi (2014) partisipasi masyarakat merupakan proses ketika masyarakat mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Hadi (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya apabila semakin tinggi pelaksanaan akuntabilitas maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, artinya semakin optimal kebijakan desa tersebut dilaksanakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab maka kesejahteraan masyarakat semakin tinggi dan terjaga dengan baik.
3. Penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, artinya semakin aktif partisipasi masyarakat diterapkan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan desa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, hal ini dilakukan untuk kepentingan bersama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehingga kesejahteraan masyarakat semakin tinggi dan terjaga dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan diperoleh kesimpulan, peneliti memberikan saran untuk menyempurnakan penelitian ini dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Bagi pemerintah Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, hendaknya pemerintah Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo menambahkan media informasi selain papan informasi yang disediakan di balai desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat desa lebih mengetahui penggunaan dana desa untuk berbagai kegiatan desa.
2. Bagi masyarakat, hendaknya masyarakat lebih berpartisipasi dan aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran alokasi dana desa dan memberikan masukan atau saran melalui musyawarah desa kepada pemerintah desa dalam berbagai pelaksanaan kegiatannya, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan desa dan pemerintah desa dapat mengetahui aspirasi dari masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat meneliti dalam ruang lingkup yang lebih luas tidak terbatas hanya di desa saja tetapi bisa di tingkat kecamatan bahkan di tingkat kabupaten. Sebaiknya menambahkan variabel lain dalam penelitian selanjutnya, sehingga dapat memberikan temuan yang *empiris* baru. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan indikator lain dalam penelitiannya sesuai dengan yang diperlukan serta mampu berinovasi dengan kuesioner yang sesuai kondisi penelitian, sehingga dapat memberikan jawaban yang lebih rinci dan lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Skripsi Universitas Negeri Walisongo Semarang*.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Bahri, Syaiful. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Dewi, M.H., Fandeli, C., & Baiquni, D.M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih. *Jurnal Kawisrata*, 3(131), 1-10. <http://journal.ugm.ac.id>
- Dwiningrum, S.I.A. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elvina, Musdhalifah. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi Dan Implementasi Kebijakan Dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa Sebagai Variabel Intervening. *JSHP* 3(1): 1-9. <http://jurnalpoltekba.ac.id/index.php/GBK/article/view/254>
- Emylia, L., & Mildawati, T., (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(6). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id>
- Fahri, I. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fahrudin. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hadi, R. R. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang). *Skripsi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Indrayani dan Setiawina. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Keberlanjutan Pariwisata Di Nusa Penida. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(4).

- Islamy, M. Irfan. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawati, Y. & Pangayouw, B. J. C,. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung Dan Kelembagaan Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(2), 77-87. <http://ejournal.akuntansisiuncen.ac.id>
- Kuswanti, A. P. E., & Kurnia. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(2), 3-22. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id>
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM.
- Nordiawan, dkk. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novitasari, & Asyik, N. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparasi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(9). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id>
- Oktavia, N. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparasi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu*.
- Purwanto, N. (2015). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Renyowijoyo & Muindro. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Nir Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sari, M. T., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparasi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(12). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 21-28. <http://publikasi.unitri.ac.id>
- Tiwinarni. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Se Kecamatan Musuk Boyolali. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Todaro, dkk. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Ulum, I. (2015). *Intellectual Capital Konsep dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wahyudin. (2015). *Penelitian Pendidikan Matematika*. Bandung: Refika Aditama.

Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1), 35-50. <http://jurnal.stieww.ac.id>

Wibisono. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Seminar Nasional Hukum Uniersitas Negeri Semarang*, 4(1), 110-131.

<https://www.jdih.sukoharjo.go.id> Diakses pada 17 September 2021

<https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/11/sistem-akuntansi-keuangan-pemerintah-daerah/> Diakses pada 17 September 2021

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Kuesioner

A. Akuntabilitas

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Proses pembuatan sebuah keputusan secara tertulis						
1.	Tahapan pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat dan disajikan secara terbuka serta tertulis untuk memudahkan dipahami masyarakat.					
Akurasi dan kelengkapan informasi						
2.	Informasi dana desa dilaporkan dengan bukti-bukti yang akurat dan lengkap serta dapat dipahami masyarakat luas.					
Kejelasan dari sasaran kebijakan dan dikomunikasikan						
3.	Proses pertanggungjawaban dana desa dilaporkan secara priodik dan terus-menerus kepada masyarakat dan pemerintah pusat.					
Penyebarluasan informasi melalui media masa akses publik						
4.	Informasi diberikan secara terbuka kepada masyarakat disebarluaskan dalam bentuk pengumuman.					
Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil						
5.	Dana desa dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten, pusat) dan kepada masyarakat luas Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.					

Sumber : Norni Oktavia (2020)

B. Kebijakan Desa

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Akses						
1.	Orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dihubungi oleh masyarakat.					
Cakupan						
2.	Pelayanan kesehatan, kepemudaan dan pembangunan fisik desa dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan bergantian sesuai dengan hasil musyawarah desa.					
Frekuensi						
3.	Turunnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri dalam setahun sebanyak 4 kali dan dilaksanakan tiap tiga bulan sekali sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020.					
Bias						
4.	Ketepatan penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan tepat sasaran dan tidak menyimpang.					
Ketepatan Layanan						
5.	Implementasi kebijakan alokasi dana desa selalu dilakukan tepat waktu dalam mengumpulkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di setiap tribulan.					
Akuntabilitas						
6.	Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan yang dilakukan					

	oleh Pemerintah Desa Jati kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ini tidak ditemukan suatu permasalahan, sehingga turunnya dana alokasi desa selalu tepat waktu.					
Kesesuaian Kebutuhan						
7.	Adanya kebijakan alokasi dana desa sangat membantu keuangan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat dan juga pembangunan di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.					

Sumber: Novitasari (2019)

C. Partisipasi Masyarakat

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa						
1.	Saya merasa masyarakat Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo selalu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa.					
Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa						
2.	Saya merasa masyarakat Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo bersedia untuk berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian, keterampilan, maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa.					
Adanya pengawasan dari masyarakat						
3.	Saya sebagai warga Desa Jati Kecamatan Gatak merasa diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa.					
Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa						
4.	Saya bersedia menerima, memanfaatkan, menjaga, melestarikan, dan					

	mengaplikasikan hasil pembangunan dari program desa.					
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Rika Ardiyanti (2019)

D. Kesejahteraan Masyarakat

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Keadilan Sosial						
1.	Adanya alokasi dana desa mampu menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo bagi warga.					
2.	Alokasi dana desa dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.					
Keadilan Ekonomi						
3.	Adanya alokasi dana desa mampu membantu keadaan ekonomi masyarakat Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.					
4.	Adanya alokasi dana desa dapat membantu status kepemilikan rumah warga menjadi semakin mudah.					
Keadilan Demokrasi						
5.	Alokasi dana desa diberikan kepada warga secara adil.					
6.	Masyarakat Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dapat mengakses informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.					

Sumber: Rifa Rizka Hadi (2019)